

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup sejahtera adalah sebuah pencapaian yang diharapkan oleh semua kalangan masyarakat. Secara sederhana hidup dinamakan sejahtera apabila individu menjalani kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak tentunya ditandai dengan terpenuhinya standar kebutuhan yang diinginkan oleh individu tersebut. Setiap individu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, karena kebutuhan tersebut tentunya didasari oleh banyak faktor baik itu dari segi usia, status, pekerjaan, jenis kelamin dll. Untuk memperoleh kehidupan yang layak tentunya setiap individu perlu memiliki penghasilan ataupun pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pendapatan setiap individu yang terdapat dalam suatu wilayah tentunya akan berbeda-beda dan berasal dari bermacam-macam sumber, diantaranya yaitu: dari sektor formal, informal dan subsisten, dimana Sektor formal yaitu pendapatan yang diperoleh dari gaji/upah bertahap, sektor informal yaitu penghasilan tambahan misalnya tukang, buruh dll. sedangkan sumber subsisten yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri.

Salah satu tujuan dari suatu negara adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. akan tetapi pada kenyataannya ada banyak hal yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Kehidupan masyarakat yang baik merupakan bentuk dari kesejahteraan. Kehidupan masyarakat yang baik akan terwujud apabila di dalam masyarakat terjadi perubahan. Kehidupan mencakup segala aspek seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masyarakat ingin terbebas dari

kemiskinan dan penderitaan. Setiap orang pasti menginginkan hidup di dunia ini dalam kondisi yang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat sebagai sumber daya yang potensial berpotensi dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) maupun dalam menghasilkan sumber daya, sehingga pemamfaatan kualitas sumber daya bergantung kepada kemampuan individu dalam mengelolanya. Dalam mengelola potensi yang ada tentunya dibutuhkan kreatifitas dari masyarakat sehingga dapat diperoleh keuntungan yang lebih. Masyarakat umumnya telah memiliki pengalaman guna memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun banyak kita jumpai di lapangan bahwa mereka (secara sendiri-sendiri atau berkelompok) belum mampu merumuskan kebutuhan mereka secara tepat. Hal ini disebabkan karena mereka belum mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang mereka hadapi.

Pada hakekatnya tujuan setiap manusia dipengaruhi oleh bagaimana cara individu tersebut berfikir, dan tentunya kemampuan setiap orang dalam berpikir dan mengidentifikasi suatu hal akan berbeda juga. Kekeliruan dalam mengidentifikasi kemampuan seseorang dalam berpikir merupakan suatu hal yang umum terjadi dan hamper dialami setiap orang. Namun ada orang yang menyadarinya dengan cepat dan ada juga yang tidak menyadarinya. Proses menyadari ini dapat terjadi melalui proses belajar. Orang yang percaya pada pemikirannya adalah pemikir yang kreatif. Berpikir bagaikan kegiatan berjalan dan bernapas yang dilakukan secara otomatis. Dalam hal ini belajar tentang bagaimana membuat suatu perubahan yang dihasratkan merupakan suatu

solusinya. Untuk membantu seseorang mencapai tujuan baru tentu dibutuhkan pola pikir yang juga baru sehingga dibutuhkan pihak yang dapat membantunya untuk belajar dan menemukan solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi pada umumnya manusia memerlukan pihak yang dapat dijadikan sebuah acuan untuk belajar. sehingga dengan kata lain masyarakat perlu pendampingan untuk mencapai masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuannya.

Pendampingan adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dipilih karena sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. pendampingan di dalam strategis bertumpu pada masyarakat . Pendampingan dapat diartikan sebagai proses dimana masyarakat dapat belajar, memecahkan masalah, dan mengorganisir dalam melakukan kegiatan aksinya. Pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat supaya dapat membebaskan diri dari ketergantungan baik mental maupun fisik. Pendampingan berperan sebagai fasilitator, animator, koordinator, sehingga dapat membantu masyarakat mendiskusikan persoalannya sendiri sepuas mungkin dan seproduktif mungkin. Sedangkan fungsi dari pendampingan yaitu berfungsi netral terhadap persoalan yang dibahas dalam proses diskusi dan tidak berwenang menentukan keputusan, kecuali memberikan fasilitas. Dengan adanya pendampingan maka masyarakat diharapkan dapat menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan merencanakan aksi. Akan tetapi pada dasarnya untuk merealisasikan tujuan yang telah direncanakan tentunya dibutuhkan modal.

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022 persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebesar 9,71%, menurun 0,43% poin terhadap

Maret 2021 dan menurun 0,48% poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah untuk rakyatnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan adalah dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pola pendudukan dan bantuan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dapat kita kenal dengan istilah "Pendampingan". Pendampingan sebagai salah satu proses pemberdayaan masyarakat merujuk pada upaya memberikan kemudahan kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pemberdayaan dimaknai dengan situasi dimana masyarakat bukan sebagai penerima manfaat, akan tetapi menjadikan masyarakat sebagai subjek utama yang berbuat secara mandiri yang berpartisipasi dalam terbukanya ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi kreasi dalam memahami lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat, peran kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di suatu desa sudah seharusnya dapat membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, agar memahami kebutuhan serta memberikan aspirasi kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa akan lebih efektif jika dilakukan dengan membentuk kelompok - kelompok dalam masyarakat.

Adapun sumber modal yang disediakan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yaitu berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, bahwa pengertian Dana Desa atau disingkat dengan DD adalah: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut: Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maka pada dasarnya Dana Desa wajib memberikan mamfaat bagi masyarakat berupa, Peningkatan kualitas hidup, Peningkatan kesejahteraan, Penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik. Sedangkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Program pelaksanaan Dana Desa adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan basis komunitas. Basis komunitas tersebut memasyarakatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama daerah yang perlu sentuhan pembangunan demi suatu kemajuan dan kesejahteraan desa tersebut. Pelaksanaan Dana Desa juga merupakan upaya terkoordinasi dan terintegrasi untuk

menciptakan lapangan kerja baru dan perbaikan infrastruktur di perdesaan. Pelaksanaan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembangunan desa yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 1.1
Data Kelompok Tani Per Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota Kelompok Tani/Petani	Jumlah Penduduk/KK
1	Pinang Sori	44	3.331	6.639
2	Badari	46	3.004	6.803
3	Sukabangun	14	1.540	4.500
4	Lumut	21	1.455	2.894
5	Sibabangun	45	877	952
6	Pandan	21	3.401	14.415
7	Sarudik	7	801	3.733
8	Tukka	32	2.870	5.552
9	Tapian Nauli	32	2.491	5.274
10	Sitahuis	13	405	1.529
11	Kolang	60	3.870	5.363
12	Sorkam	76	1.005	4.254
13	Sorkam Barat	64	1.433	4.534
14	Pasaribu Tobing	29	907	1.828
15	Sosor Godang	47	2.011	4.549
16	Barus	37	1.303	3.736
17	Barus Utara	17	907	4.051
18	Andam Dewi	60	877	1.342
19	Manduamas	45	1.223	5.585
20	Sarandorong	47	2.079	4.088
Jumlah		757	35.790	91.621

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah 2021

Dari data tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang tersebar di 20 Kecamatan, berpartisipasi dalam kelompok tani, dengan total 757 kelompok tani yang terdiri 35.790 anggota

kelompok tani. Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Kecamatan dari objek peneliti ini dengan jumlah kelompok tani sebanyak 32 kelompok tani dengan anggota kelompok tani 2.941 anggota dari jumlah penduduk 5.274 Kepala Keluarga.

Bupati Tapanuli Tengah (Bakhtiar Ahmad Sibarani) menyampaikan bahwa program pembangunan Dana Desa merupakan program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu disampaikan oleh Bupati Tapanuli Tengah pada saat Rapat Koordinasi dengan Kajari Sibolga, Kapolres Tapanuli Tengah yang diwakili oleh Kabag Reskrim Polres Tapanuli Tengah, Asisten Pemerintahan dan Kesmas, Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah (Kab. Tapteng), Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapteng, Camat dan Kepala Desa (Kades) se Kab. Tapteng yang diadakan di Aula Visual SMAN 1 Matauli Pandan. Bupati Tapanuli Tengah mengharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang sedang berlangsung hendaknya dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat dengan baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkarakter, mandiri, berakhlak dan berkeadilan yang sejahtera. (Kominfo, 2017).

Tabel 1.2
Jumlah Kelompok Tani Di Kecamatan Tapian Nauli Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota Kelompok Tani/Petani	Jumlah Penduduk/KK
1	Tapian Nauli I	6	461	1.077
2	Mela Dolok	-	-	8
3	Aloban Bar	-	-	136
4	Tapian Nauli III	5	331	587

5	Tapian Nauli II	5	578	1.102
6	Tapian Nauli IV	4	265	488
7	Mela I	6	489	989
8	Mela II	6	367	849
9	Bair	-	-	38
Jumlah		32	2.491	5.274

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah 2021

Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2020, jumlah kelompok tani sebanyak 32 Kelompok tani dengan jumlah anggota 2.491 anggota dari penduduk yang berdomisili di Kecamatan Tapian Nauli sebanyak 5.274 kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut : Desa tapian Nauli I terdiri dari 6 kelompok tani dengan anggota 461 KK, Desa Mela Dolok, Desa Aloban Bar dan desa Bar tidak memiliki kelompok tani. Desa Tapian nauli III terdiri dari 5 kelompok tani dengan anggota 331 kepala keluarga, desa Tapian Nauli II terdiri dari 5 kelompok tani dengan anggota 578 KK, desa Tapian nauli IV terdiri dari 4 kelompok tani dengan anggota 265 KK, desa Mela I terdiri dari 6 kelompok tani dengan anggota 489 KK, desa Mela II terdiri dari 6 kelompok tani dengan anggota 367 KK.

Dana Desa disalurkan secara langsung oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota. Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibiayai dari Dana Desa tersebut berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Besaran Dana Desa pada setiap Desa tentunya akan berbeda jumlahnya hal ini disebabkan oleh pembagian Dana Desa dari RKUD Kabupaten/Kota yang dialokasikan secara adil yaitu berdasarkan: Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Rincian Dana Desa untuk desa Tapian Nauli III Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2019 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Tapian Nauli III Tahun 2019-2020 Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun	Alokasi Dana Desa(Rp)	Dana Desa (Rp)	Total (Rp)
2019	229.230.000	653. 667.600	882.897.600
2020	235.500.000	663. 356.055	898.856.055
Jumlah	464.730.000	1.317.023.655	1.781.753.655

Sumber : Kecamatan Tapian Nauli Tapanuli Tengah Dalam Angka

Dari tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa desa Tapian Nauli III pada tahun 2019 mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 229. 230.000, dan Dana Desa (DD) sebesar Rp 653.667.600. Sementara tahun 2020 Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi Rp 235.730.000,- dan Dana Desa (DD) menjadi Rp 663.356.055,- . Artinya, bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa tapian nauli III dari tahun 2019 ke tahun 2020 menhgalami kenaikan.

Kecamatan Tapian Nauli khususnya Desa Tapian Nauli III, terdapat beberapa kegiatan ataupun pekerjaan yang dapat dilakukan masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Diantaranya yaitu, bertani, beternak, melaut, buruh pabrik, PNS/TNI/POLRI, berdagang. Ada banyak Potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Tapian Nauli III dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya yaitu bersumber dari Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan. dll. Jika dilihat kegiatan masyarakat yang diambil dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tanaman Pangan di Desa Tapian Nauli III

No	Jenis Tanaman	Luas Panen Tanaman Pangan (ton)			Jumlah Produksi (ton)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	1.140	1.212	1.212	4.161	5.652,75	2.860,68
2	Padi Ladang	278	11	-	878	379,20	-
3	Jagung	63	-	-	313	-	-
4	Ubi Kayu	2	2	-	60	17,08	-

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Sedangkan jika dilihat dari segi jumlah peternakan yang ada di Kecamatan Tapian Nauli maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.5
Populasi Ternak di Desa Tapian Nauli III

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak Besar dan Kecil (Ekor)	
		2019	2020
1	Sapi	10	9
2	Kerbau	29	20
3	Kambing	40	39
4	Domba	-	-
5	Babi	511	500
6	Ayam	3.201	2.093

Sumber: Data Diolah dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa penduduk Kecamatan Tapian Nauli di bidang pertanian lebih dominan Bertani pada jenis tanaman padi sawah. Akan tetapi di beberapa jenis tanaman yaitu padi pada tahun 2019 ke 2020 terdapat penurunan jumlah produksi yang begitu drastis. Salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya jumlah produksi pertanian diantaranya yaitu rendahnya penghasilan, dan kesejahteraan yang diperoleh jika bekerja menjadi petani, sehingga para petani beralih ke pekerjaan lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi turunya jumlah produksi pertanian di tahun 2019 ke 2020 disebabkan oleh perolehan masyarakat terhadap Edukasi tentang pertanian, serta kurangnya penguasaan Teknologi Pertanian. Berdasarkan catatan CIPS, pada 2014 sebanyak 54,8 juta orang bekerja

di sektor pertanian. Jumlah ini sama dengan 34% dari total jumlah pekerja di Indonesia. Namun 34,3 juta diantaranya tergolong miskin atau rentan. Hal ini tentunya tidak lain diakibatkan oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada Desember 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga beras di tingkat penggilingan sebesar Rp. 9.248 per kilogram dengan artian naik 0,81% dibandingkan bulan sebelumnya pada tahun 2019. Akan tetapi melihat kenaikan harga yang sangat sedikit tersebut tentunya tidak terlalu berdampak taraf hidup masyarakat yang ada di Desa Tapian Nauli III. Dari tahun 2018 hingga Tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera yang tercatat di Badan Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Desa Tapian Nauli III

No	Tahun	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera
1	2018	299
2	2019	83
3	2020	25

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Tahun 2019,2020,2021

Melihat angka kemiskinan yang ada tentunya pemerintah hendaknya memberikan kemudahan bagi masyarakat. yang ada di desa tersebut. Desa Tapian Nauli III adalah salah satu desa dengan banyak sumber daya. Seperti yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Saat ini ada banyak jenis wirausaha yang dihasilkan dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, serta perikanan. Semua sektor tersebut tentunya ada di desa Tapian Nauli III. Akan tetapi karena masyarakat di desa Tapian Nauli III terdiri dari masyarakat dengan latar belakang Pendidikan yang berbeda, dan ekonomi yang berbeda tentunya menjadikan

masyarakat kurang memahami bagaimana cara memanfaatkan potensi yang ada, sehingga diperlukan pendampingan khusus bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Pemamfaatan potensi yang ada tentunya merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam memberdayakan masyarakat. Hasil mentah dari produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan jika diolah tentunya akan menghasilkan nilai tambah yang dapat menguntungkan bagi masyarakat desa dan tentunya akan sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga berwirausaha dengan memanfaatkan potensi yang ada tentunya akan sangat menguntungkan karena sudah tersedianya sumber untuk dijadikan usaha. Akan tetapi masalah yang sering dihadapi oleh seseorang dalam memulai suatu usaha adalah kurangnya pengetahuan tentang wirausaha dan untuk merealisasinya sumber modal manakah yang akan digunakan untuk mendirikan usaha tersebut.

Masyarakat desa Tapian Nauli III dalam memanfaatkan potensi yang ada perlu didampingi. Pendampingan dapat diperoleh dari Pemerintah, swasta dll. Dengan pendampingan saja tentunya tidak akan cukup. Seperti yang sudah kita ketahui untuk mendirikan suatu usaha dibutuhkan adanya modal. Hanya dengan pendampingan saja maka suatu usaha tidak akan terealisasi. Pendampingan sebagai proses pemberdayaan masyarakat akan sangat dibutuhkan masyarakat desa Tapian Nauli III dalam mendorong masyarakat untuk mencapai perubahan. Tersedianya Modal dan dukungan pemerintah berupa pendampingan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut tentunya akan menarik perhatian masyarakat di desa Tapian Nauli

III, sehingga akan memungkinkan bahwa masyarakat desa Tapian Nauli III memiliki minat berwirausaha di berbagai sektor yang ada dan layak untuk dimanfaatkan, yaitu dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. . Pemerintah harus dapat mendorong minat masyarakat yang ada di wilayahnya dalam berwirausaha agar setiap masyarakat hidup mandiri dan mendapatkan kehidupan yang layak sehingga angka kemiskinan dapat diperkecil. Maka berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Pendampingan Dan Akses Modal Terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat Di Desa Tapian Nauli III”**. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu pendampingan, Akses modal, dan minat berwirausaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain di atas Adapun hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada pengaruh Pendampingan terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III.
2. Apakah ada pengaruh Akses Modal terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat di Desa Tapian Nauli III
3. Apakah ada pengaruh Pendampinga dan Akses Modal Terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat di Desa Tapian Nauli III

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada maka diketahui Tujuan dari Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendampingan terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Akses Modal terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat di Desa Tapian Nauli III.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendampingan dan Akses Modal terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dalam penulisan Penelitian ini dapat bermamfaat sebagai berikut :

1. Peneliti

Dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai bagaimana Pengaruh Pendampingan Dan Akses Modal Terhadap Minat Berwirausaha Masyarakat Di Desa Tapian Nauli III dan juga Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam penulisan laporan yang sejenis.

2. Akademisi

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi penelitian dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan sebagai sumber informasi untuk melaksanakan penelitian di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Lembaga tempat penelitian

Dapat menjadi referensi bagi pemerintah Desa Tapian Nauli III dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Tapian Nauli III khususnya bagi kelompok tani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Suatu negara dibentuk tentunya memiliki tujuan yaitu menyejahterakan rakyatnya, maka dari itu diperlukan adanya penyelenggara negara. Pemerintah sebagai bagian terpenting dalam penyelenggara negara berperan sebagai dinamisator dan regulator. Noor dalam Tri Wahyuningsih (2020: 34), mengatakan bahwa Peran dan fungsi pemerintah dalam perkembangan ekonomi publik, diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan, peraturan dan perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan ketahanan ekonomi publik terhadap gejolak atau krisis ekonomi global
2. Menyediakan berbagai fasilitas dan insentif untuk kepentingan publik. Hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan negara guna menyejahterakan masyarakat.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat mencapai perubahan merupakan suatu hal yang sangat dituhkan oleh masyarakat saat ini karena melihat jumlah pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan. Pemberdayaan masyarakat juga bukan hanya semata-mata menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di

lingkungan sekitar masyarakat, misalnya pihak swasta yang bersedia melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan akan sangat efektif apabila pihak yang melakukan pemberdayaan mengerti apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat sehingga solusi pemecahan masalah yang diberikan sejalan dengan masalah yang ada.

Menurut Nalom Siagian (2022: 71), bahwa Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya.

Pemberdayaan masyarakat desa diatur di dalam dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 Tentang Desa disebutkan bahwa, belanja desa (dimana dana desa menjadi sumber utama pendapatan desa) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Sedangkan kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Tentang Desa menyatakan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local serta pemamfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 mengatur agar desa memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan penekanan pada :

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infratraktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan, dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan masyarakat
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi
5. pembangunan dan pengembangansarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Maka berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada pada suatu daerah.

2.1.2 Pendampingan

2.1.2.1 Pengertian Pendampingan

Dalam melakukan suatu Tindakan atau kegiatan hampir seluruh individu memerlukan pendampingan. Kata pendampingan bukanlah sebuah istilah baru saat ini karena pendampingan sudah muncul sejak tahun 90-an. Pendampingan sering diartikan sebagai suatu interkasi yang terjadi secara berkelanjutan yang berasal dari luar individu, yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan. Pendampingan sebagai suatu usaha yang membantu individu dalam mencapai perubahan merupakan tugas dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta pihak swasta yang menyediakan pendampingan yg dibutuhkan masyarakat dalam suatu tempat.

Menurut Edi Suharto (dalam Lidia Nugrahaningsih Ayal 2015), Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antar pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan adalah Proses dari pemberdayaan masyarakat yang bentuk aktivitas atau kegiatannya bertujuan untuk mencapai perubahan dimana di dalamnya terdapat pendamping dan orang yang di dampingi yang nantinya akan memperoleh dampingan dari pendamping, sehingga seorang pendamping harus siap berperan sebagai

Fasilitator, Komunikator dan Dinamisator. Akan tetapi hal yang perlu diingat adalah pendampingan harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Salah satu proses yang dapat ditempuh oleh pendamping dalam membantu masyarakat mencapai perubahan yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses atau strategi yang ditempuh oleh pendamping dalam membantu masyarakat mencapai perubahan. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat desa yang terorganisir.

Pendampingan Masyarakat Desa dalam Permendesa PDTT 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan masyarakat desa diatur secara structural kembali yaitu dilaksanakan oleh Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di tingkat Kecamatan Pendampingan Masyarakat Desa dikoordinasikan oleh Camat dan sebutan lainnya. Dalam pendampingan masyarakat desa tersebut, Menteri, Pemprov, Pemkab=pemkot dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan/atau pihak ketiga.

2.1.2.2 Tujuan Pendampingan

Pendampingan bertujuan membantu individu dan atau kelompok dalam pengembangan manusia seutuhnya (mengoptimalkan potensinya), dengan lebih spesifik adalah membantu dampingan agar mampu mandiri antara lain memiliki

sumber penghasilan yang tetap dan layak, sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang mampu berperan dalam lingkungannya. (Nalom Siagian, 2022 : 58)

Suryaman, dkk dalam Nalom Siagian (2022: 55) mengatakan bahwa terdapat 7 Prinsip pendampingan yaitu:

1. Pendampingan merupakan proses penyadaran diri bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan
2. Berkeyakinan bahwa kelompok pendampingan atau individu dalam dirinya mampu berkembang sesuai dengan tujuannya.
3. Kegiatan pendampingan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan kelompok usaha atau individu
4. Pendekatan pendampingan berangkat dari lapisan paling bawah (bottom up).
5. Pendampingan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya
6. Pendampingan diutamakan pelaksanaannya melalui kelompok dan dalam kelompok artinya pendampingan bukan secara pribadi tetapi atas nama situasi institusi
7. Pendampingan memprioritaskan pada partisipasi

Berdasarkan uraian di atas mengenai maka dapat kita ketahui bahwa Pendampingan pada dasarnya bertujuan untuk membantu keberhasilan masyarakat untuk mencapai perubahan yang lebih baik sehingga dapat dilihat dan dirasakan hasil dari pendampingan tersebut. Pendampingan pada dasarnya akan berhasil apabila kegiatan yang dilakukan oleh pendamping menghasilkan sesuatu yang bermamfaat. Sehingga dapat diartikan bahwa keberhasilan pendampingan akan terwujud jika dilakukan kegiatan yang nantinya dapat memberdayakan masyarakat di Daerah tersebut. Seorang pendamping harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari invidi ataupun kelompok yang akan didampingi. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari bagaimana pemimpinnya mengelola sumber daya yang ada. akan percuma jika sumber daya yang ada tidak

diberdayakan. walaupun pada kenyataannya untuk mencapai keberhasilan tersebut bukanlah hal yang mudah.

2.1.2.3 Indikator Pendampingan

Menurut Suharto (dalam Rauf A, Hatu : 2010), menyatakan bahwa ada 4 indikator dari pendampingan yaitu:

1. Pemungkinan (Enabling) atau fasilitasi
Merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negoisasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.
2. Penguatan
Merupakan suatu fungsi yang erat kaitannya dengan Pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pada dasarnya pendamping harus berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan serta pengalaman masyarakat yang di dampingi, menumbuhkan kesadaran masyarakat , menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan juga menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat
3. Perlindungan
Merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi pendamping dengan Lembaga-lembaga Eksternal atas nama dan demo kepentingan masyarakat yang didampinginya. Pendamping juga dapat bertugas sebagai pencari sumber-sumber informasi, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan yang terakhir membangun jaringan kerja sekaligus sebagai Konsultan.
4. Pendukungan
Proses berjalannya pendampingan tentunya harus memerlukan dukungan dari seorang pendamping, yang artinya disini adalah selain sebagai pengorganisir masyarakat dan kegitannya pendamping harus mampu melakukan tugas-tugas sesuai dengan keterampilan dasar yang dimiliki oleh si pendamping. Hal ini bertujuan untuk memberikan perkembangan positif pada masyarakat.

Berdasarkan beberapa Indikator di atas, maka yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah; (1) Pemungkinan atau Fasilitasi, (2) Penguatan, dan (3) Perlindungan. Hal ini disebabkan karena indikator keempat menurut penulis

indikator tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap masyarakat, akan tetapi untuk pendamping.

2.1.3 Akses Modal

2.1.3.1 Pengertian Modal

Modal merupakan sebuah pengorbanan yang diberikan dalam membuka sebuah usaha, modal dapat berupa uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha. Besaran modal yang diperlukan dalam menjalankan usaha akan berbeda, hal ini tergantung dari jenis dan kapasitas usaha yang akan dijalankan. Perhitungan terhadap besarnya modal perlu dilakukan sebelum usaha tersebut dijalankan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan modal tenaga keahlian perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pendirian suatu usaha berkaitan erat dengan kebutuhan usaha. Adapun kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usaha masing-masing perusahaan.

Menurut Kasmir (2016: 85), modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. jenis modalnya bersifat jangka Pendek, biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali setelah proses produksi. Modal kerja digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modal adalah dana yang dimanfaatkan sebagai suatu pokok atau induk untuk melakukan perdagangan.

Harta atau benda tersebut juga bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu yang mampu meningkatkan kekayaan, dll. Jumlah kekayaan yang diperoleh dari suatu modal sangat dipengaruhi oleh bagaimana si pemilik modal mempergunakan modal yang ada untuk memperoleh laba.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Modal merupakan suatu pengorbanan yang wajib diberikan dalam mendirikan suatu usaha dalam bentuk barang ataupun uang, yang bersumber dari milik pribadi maupun eksternal.

Menurut Kasmir (2006: 95-96) Pengertian masing-masing modal dapat dilihat dari sumber asalnya yaitu sebagai berikut :

1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya akan membayar Dividen

2. Modal Asing (Pinjaman)

Modal Asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya Administrasi, serta biaya provisi, dan Komisi yang besarnya relatif.

Demikian halnya dengan perekonomian masyarakat yang ada pada suatu daerah. Pendapatan setiap masyarakat tentunya akan sangat berbeda-beda, Ada banyak hal yang melatar belakangi mengapa hal tersebut terjadi, diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, minimnya motivasi diri pada masyarakat untuk mencapai perubahan, serta modal yang tidak mencukupi. Untuk mendapatkan hidup yang layak tentunya setiap

masyarakat memerlukan usaha apakah itu milik perorangan atau berkelompok. Realita yang kita temukan di kalangan masyarakat saat ini terutama masyarakat yang tergolong kalangan menengah kebawah menemukan banyak kesulitan dalam mendirikan usaha, misalnya karena Lokasi, Modal, dan pengetahuan tentang bagaimana berwirausaha.

Seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya tentang modal, modal untuk mendirikan suatu usaha berasal dari 2 (dua) sumber yaitu, modal sendiri dan modal pinjaman. Ada banyak sumber pinjaman untuk mendapatkan modal saat ini diantaranya adalah : Bantuan dana dari pemerintah, pinjaman dari bank, Angel Investor, pinjaman dari Lembaga keuangan bukan bank, dll. Pinjaman perbankan dan Bantuan dari pemerintah merupakan cara paling aman untuk mendapatkan pinjaman. Akan tetapi dalam praktiknya perbankan hanya mau membiayai usaha yang sudah berjalan baik yang merupakan perluasan usaha atau penambahan kapasitas produksi. Artinya dunia perbankan hanya mau membiayai usaha yang sudah berjalan, oleh karena itu untuk usaha yang baru kebutuhan dana dapat diperoleh dari pihak sendiri atau pihak lainnya. Maka dengan demikian kesempatan masyarakat miskin yang belum memiliki usaha akan sulit untuk mendapatkan modal padahal masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut untuk mendapatkan hidup yang layak.

Kepala Desa Sebagai Pemerintah yang ada pada suatu desa hendaknya memperhatikan hal yang demikian. Pemerintah harus mampu mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala masyarakat setempat dalam mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah desa sebagai pendamping masyarakat dalam

membantu mencapai perubahan wajib menjadi Fasilitator, Komunikator dan Dinamisator. Tidak hanya mendampingi pemerintah desa juga harus menyalurkan modal secara transparan terkait pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, sehingga masyarakat tidak hanya sebatas memperoleh pelatihan, tetapi harus terealisasi apa saja yang menjadi program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Dengan adanya modal tersebut tentunya akan berpotensi membangun minat masyarakat yang ada di desa tersebut dalam berwirausaha, serta mengembangkan usaha masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

Dengan adanya akses modal yang diperoleh masyarakat dari pemerintah tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hidup yang lebih layak. Sumber Modal yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dapat bersumber dari dana desa dan Alokasi Dana Desa. Dengan adanya Pengelolaan Dana Desa yang baik untuk membiayai pemberdayaan masyarakat desa, maka diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera serta mampu meningkatkan perekonomiannya secara mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat

menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera. Dana desa di prioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Alokasi Dana Desa diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 atas perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa. dimana tertulis bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran. Tujuan Alokasi Dana Desa tertuang di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah: Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, serta Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dana Desa adalah 1 (satu) dari 7(tujuh) sumber pendapatan keuangan desa yang berasal dari APBN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana desa, besaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat

kesulitan geografis. Berdasarkan kebijakan Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal Perimbangan keuangan mengenai kebijakan Dana desa tahun 2021, arah kebijakan Dana desa di 2021 yaitu:

1. Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana desa
 - a. Peningkatan porsi Alokasi Formula guna memperbaiki proporsi alokasi Dana desa per desa agar sesuai dengan karakteristik desa dan perbaikan metode perhitungan AD, AF, Dan AA.
 - b. Penguatan alokasikinerja (AK) untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa
 - c. Pemberian Reward kepada Desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran Dana desa dalam 2 (dua) tahap.
2. Mendukung Pemulihan perekonomian Desa
 - a. Penguatan Program padat karya tunai dan jarring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai
 - b. Pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di desa
 - c. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital
 - d. pengembangan potensi, antara lain pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, pengembangan Kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUMDes.
3. Mendukung Pengembangan Sektor prioritas
 - a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital

- b. program ketahanan pangan dan ketahanan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi
- c. pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata
- d. peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastuktur desa yang pelaksanaannya di prioritaskan dengan padat karya tunai
- e. program Kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di desa.

Tabel 2.1
Alokasi

Alokasi Dasar (AD)	Dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan kluster jumlah penduduk
Alokai Formula (AF)	Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat esulitan geografis desa
Alokasi Alternatif (AA)	Dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk tinggi
Alokasi Kinerja (AK)	Dibagi kepada desa yang memiliki kinerja baik

Sumber :Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat jenderal perimbangan keuangan (2021)

Berikut penyempurnaan bobot alokasi Formula untuk lebih mencerminkan keseimbangan antara penduduk dan kewilayahan :

Tabel 2.2
Alokasi Formula Dana Desa

No	Alokasi Formula		
	Indikator	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (JP)	10%	10%

2	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	50%	40%
3	Luas Wilayah (LW)	15%	20%
4	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	25%	30%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat jenderal perimbangan keuangan (2021)

Maka dengan demikian besarnya alokasi biaya untuk setiap desa sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Suksesnya pendampingan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat tentunya harus di dukung dengan transparansi dari pihak pemerintah agar modal yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

2.1.3.2 Indikator Modal

Menurut Endang Purwanti (2012), indikator modal usaha adalah sebagai berikut:

1. Modal sebagai syarat untuk usaha
 Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Setiap usaha atau perusahaan membutuhkan dana atau biaya untuk dapat beroperasi. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap usaha wajib mempunyai modal dalam beroperasi. oleh sebab itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar memulai usaha.
2. Pemamfaatan modal tambahan
 Bantuan modal yang diterima mutlak dimanfaatkan untuk menjalankan usahanya sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat
3. Besar modal
 Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam mencapai laba yang diinginkan, sehingga bear kecilnya modal tergantung dengan kapasitas usaha yang didirikan.

Maka yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu: (1) Modal Sebagai Syarat Usaha, (2) Pemamfaatan Modal Tambahan, dan (3) Besar Modal. . Hal ini

disebabkan karena penulis ingin mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

2.1.4 Minat Berwirausaha

2.1.4.1 Wirausaha

Sebagai makhluk sosial setiap orang perlu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada banyak bentuk kegiatan yang dapat dilakukan manusia setiap harinya. Bertransaksi merupakan salah satu contoh kegiatan Berwirausaha yang dapat dilakukan setiap orang untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang di inginkan. Bertransaksi pada umumnya terjadi karena terdapat dua pihak yang saling membutuhkan yaitu antara si pembeli dan si penjual. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu dan berkelompok.

Menurut Kasmir (2006:19), secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil Risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri maupun berkelompok, Seorang wirausaha dalam pikirannya selalu berusaha mencari, mendapatkan serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan.

Wirausaha dapat dikelola secara pribadi dan berkelompok. Jika dikelola secara pribadi tentunya pemilik dari usaha tersebut adalah satu orang. Jika dikelola secara berkelompok maka tentu saja perusahaan tersebut dimiliki oleh sekelompok orang, biasanya akan sangat mudah memperoleh modal jika kegiatan berwirausaha dilakukan secara berkelompok. Seorang wirausahawan dituntut harus mampu memiliki kreativitas dan Inovasi. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan oleh seorang wirausahawan dalam mengembangkan usahanya. Sangat

fatal akibatnya jika sebuah usaha didirikan oleh orang yang tidak memiliki kreativitas. Usaha tersebut tidak akan berkembang bahkan rugi sehingga usaha tidak layak dijalankan lagi.

Wirausaha harus memiliki ide yang dapat diimplementasikan dalam bentuk usaha. Dengan memiliki ide tersebut, wirausahawan diharapkan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam mewujudkan ide tersebut. Pikiran kreatif tentunya akan sangat berpengaruh dalam kualitas pemecahan masalah. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya selain pikiran yang kreatif dibutuhkan adanya inovasi. Kreativitas dan inovasi diperlukan untuk menciptakan keunggulan dibandingkan dengan usaha-usaha pesaing.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah ide pemikiran kreatif yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan ataupun usaha, yang kegiatannya dapat dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Potensi yang dimiliki seseorang dalam dirinya mampu menjadikannya sebagai wirausahawan, sehingga saat ini ada banyak sekali usaha yang kita temukan. Usaha yang ada pada suatu daerah biasanya akan sangat berhubungan dengan sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Adapun tipe wirausaha yang paling sering dijumpai adalah Tipe Bisnis Rumahan. Arif Yusuf Hamali dalam bukunya yang berjudul *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan* mengatakan bahwa 53% dari sejumlah bisnis yang ada di atas dijalankan dari rumah. Tetapi sekitar 90% diantaranya sangat kecil dan tanpa karyawan. Bisnis kecil bahkan sampai tidak memiliki karyawan menggambarkan bahwasanya setiap

orang memiliki minat untuk berwirausaha. Sangat disayangkan jika jumlah minat tersebut tidak dikembangkan. Berkembangnya suatu usaha tidak akan terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh wirausaha tersebut. Ada banyak yang melatarbelakangi mengapa suatu usaha tidak berkembang. Diantaranya adalah tidak adanya kreativitas dan inovasi, kurangnya akses memperoleh modal, dan tidak adanya minat.

2.1.4.2 Minat

Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya pasti memerlukan pengorbanan, baik itu biaya, waktu dan Tenaga. Terpenuhinya kebutuhan setiap individu tentunya akan menghantarkannya pada rasa Bahagia. Kebahagiaan menjadi salah satu cita-cita setiap individu. Mendapatkan hidup yang Bahagia diperlukan usaha. Kebahagiaan tidak akan bisa didapatkan jika hanya dengan berpangku tangan sambil menunggu dan mengharapkan nasib yang baik. Kebahagiaan ataupun kesejahteraan hidup harus dicapai dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada Sebagian besar anggota masyarakat Indonesia telah terdapat kesadaran terhadap pentingnya Pendidikan dalam usaha mewujudkan idaman hidup Bahagia.

Minat berwirausaha dapat tumbuh dengan melihat seseorang yang sukses dalam berwirausaha sehingga memunculkan ketertarikan terhadap diri sendiri untuk melakukan suatu usaha. Minat berwirausaha adalah merupakan suatu Hasrat yang kuat terhadap aktivitas kewirausahaan, baik di sadari atau tidak terpuaskan lewat perilaku tertentu”. (Agustini, 2007: 20).

Ada banyak cara yang dapat membantu orang-orang dalam Mencapai tujuan hidup, salah satunya adalah memiliki Pendidikan. Saat ini orang-orang berlomba untuk memperoleh Pendidikan di sekolah formal. Tujuan Pendidikan adalah mewujudkan pribadi-pribadi yang mampu menolong diri sendiri ataupun orang lain, sehingga demikian terwujudlah kehidupan manusia yang sejahtera. Semakin maju suatu negara, semakin banyak jumlah orang yang terdidik, dan banyak pula orang yang menganggur maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang kegiatan wirausaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan karena kemampuan pemerintah yang sangat terbatas. Akan tetapi pada realitanya terutama di daerah masyarakat tertinggal masih banyak masyarakat yang sama sekali belum pernah menempuh Dunia Pendidikan, ada juga yang tidak selesai dalam pendidikannya. Maka dari itu pemerintah harus memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk mencapai kehidupan yang layak.

Maka dengan melihat peluang yang ada, masyarakat juga harus berusaha mandiri. Setiap usaha hendaknya dilandasi dengan minat. Minat merupakan kata yang saat ini sudah sangat sering kita dengarkan. Pada dasarnya minat akan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan. Dapat di defenisikan pengertian minat adalah perhatian yang diberikan pada suatu objek tertentu yang dapat mendorong seseorang pada objek tersebut.

Menurut Aprianty (2013:312) Minat dapat didefenisikan sebagai ssesuatu yang membangkitkan perhatian pada suatu hal. Minat memiliki pengaruh yang besar bagi setiap orang yang menjalankan suatu kegiatan. Dengan adanya minat

maka individu akan termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan. Begitu juga dengan masyarakat yang akan menjalankan usaha ataupun kegiatan yang menuju perubahan yang lebih baik, atau hidup sejahtera tentunya akan sangat memerlukan minat yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan. Minat seseorang pada suatu objek dipengaruhi oleh banyak faktor.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Minat merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang yang bersumber dari dalam dirinya maupun eksternal, sehingga termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan.

2.1.4.3 Indikator Minat

Menurut Agustini (2007:20) Indikator minat berwirausaha adalah sebagai berikut:

1. Kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup
2. Keyakinan kuat atas kekuatan diri
3. Sikap jujur dan bertanggung jawab
4. Ketahanan Fisik dan Mental
5. Ketekunan dan keuletan dalam bekerja dan berusaha
6. Pemikiran yang Kreatif dan Konstruktif
7. Berorientasi ke masa depan
8. Berani mengambil resiko

Maka yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu: (1) Kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup, (2) Ketahanan Fisik dan Mental dan (3) Berani mengambil resiko. Hal ini disebabkan karena penulis ingin mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu tentang pendampingan, Alokasi biaya, dan Minat Berwirausaha

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tujuan	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Pendampingan dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Misykat Laz daruut Tauhid Peduli Kota Semarang, Oleh Novi Wahyuningsih, tahun 2019	(X1): Pendampingan (X2): Modal Usaha (Y): Perkembangan Usaha	Pendampingan dan Modal usaha berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha anggota misykat DT-Pedulikota Semarang.
2	Analisis Pengaruh Pemberian Modal Kerja, Pelatihan, dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq Kota Semarang (Studi Kasus LAZ DPU-DT Cabang Semarang) oleh Muhamad Nurisin S.Ei tahun 2011	(X1) : Modal Kerja (X2) : Pelatihan (X3) : Pendampingan (Y) : Peningkatan Pendapatan Mustahiq Kota Semarang.	Variabel modal kerja (X1), Pelatihan (X2), dan pendampingan (X3) masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan Musthiq kota semarang. Secara Bersama modal kerja, pelatihan dan pendampingan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan Mustahiq kota Semarang
3	Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan, Bantuan Pemasaran dan Pendampingan Usaha	X1 : Bantuan Modal X2: Pelatihan	Secara uji simultan bantuan modal, pelatihan, bantuan

	Perkembangan UMKM di Kecamatan Warungasem (Studi kasus pada program pemberdayaan UMKM di Perindagkop Kabupaten Batang), Oleh Setiani, Kurnianingsih tahun 2015	X3: Bantuan pemasaran X4: Pendampingan Usaha	pemasaran dan pendampingan usaha berpengaruh positif signifikan, sedangkan secara uji parsial bantuan modal tidak berpengaruh secara signifikan dan variable lainnya berpengaruh secara signifikan
--	--	---	--

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Novi Wahyuningsih (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendampingan dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Misykat Laz darrut Tauhid Peduli Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendampingan berpengaruh atau tidak terhadap perkembangan Usaha, dan mengetahui modal usaha berpengaruh atau tidak terhadap perkembangan Usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan pada variabel Pendampingan H_0 ditolak dan H_a diterima, nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,203 > 1,544$) dan nilai signifikansi $0,002 < 0,005$. Artinya secara statistik terbukti variabel pendampingan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perkembangan usaha. Sedangkan pada variabel modal usaha H_0 ditolak dan H_a diterima karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,859 > 1,544$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$, artinya secara statistic variabel modal usaha berpengaruh terhadap perkembangan usaha.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhamad Nuridin S.Ei (2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Modal Kerja, Pelatihan, dan

Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq Kota Semarang (Studi Kasus LAZ DPU-DT Cabang Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal kerja, pelatihan, dan pendampingan berpengaruh pada peningkatan pendapatan mustahiq. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal kerja, pelatihan, dan pendampingan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahiq kota Semarang. Terlihat F hitung (7,338) > F tabel (2,82) yang berarti modal kerja, pelatihan dan pendampingan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahiq kota Semarang.

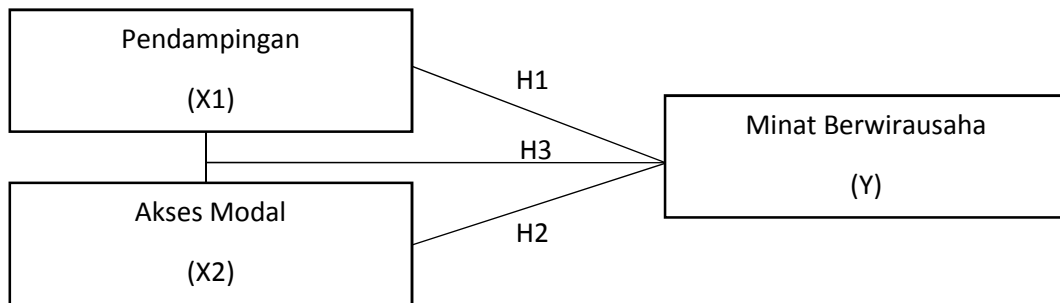
3. Penelitian kedua dilakukan oleh Setiani, Kurnianingsih tahun (2015) yang berjudul “Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan, Bantuan Pemasaran dan Pendampingan Usaha Perkembangan UMKM di Kecamatan Warungasem (Studi kasus pada program pemberdayaan UMKM di Perindagkop Kabupaten Batang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan modal, pelatihan, bantuan pemasaran, dan pendampingan usaha berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Perindagkop Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan Secara uji simultan bantuan modal, pelatihan, bantuan pemasaran dan pendampingan usaha berpengaruh positif signifikan, sedangkan secara uji parsial bantuan modal tidak berpengaruh secara signifikan dan variable lainnya berpengaruh secara signifikan.

2.3 Kerangka konseptual pemikiran

Adapun kerangka Konseptual dari penelitian ini yang dilandaskan pada Tinjauan Pustaka yaitu:

Gambar 2.1

Gambar Konseptual Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Nalom Siagian (2021: 62) Dengan menyusun dugaan awal maka sebenarnya peneliti telah melakukan beberapa hal penting yakni jalan yang memudahkan atau mengikuti kaidah ilmiah penelitian. Dengan Hipotesis peneliti akan : (1) Mempunyai tuntunan/pedoman dalam melakukan penelitian lebih lanjut, (2) Mendapatkan arah-tujuan penelitian menyangkut variabel, ukuran dan lainnya, (3) Mendapatkan imajinasi logis untuk mendisain penelitian hingga rancangan kesimpulan dan riset yang dilakukan.

Maka berdasarkan Penelitian di atas, dapat diambil Hipotesis penelitian yaitu:

Hipotesis Pertama:

H₀ : Tidak Terdapat pengaruh Pendampingan terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III

Ha : Terdapat pengaruh Pendampingan terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III

Hipotesis Kedua:

H0 : Tidak Terdapat pengaruh Akses Modal terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III

Ha : Terdapat pengaruh Akses Modal terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III

Hipotesis Ketiga:

H0 : Tidak Terdapat pengaruh secara simultan Pendampingan dan Akses Modal terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III

Ha : Terdapat pengaruh Pendampingan dan Akses Modal secara simultan terhadap Minat Berwirausaha masyarakat di Desa Tapian Nauli III

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Metode Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. (Erwin Widiasworo 2019: 31).

3.2 Rancangan Penelitian

Menurut Nazir (dalam jurnal Nalom Siagian 2018;100)mengatakan rancangan penelitian merupakan semua proses yang diprlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian ,mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan penelitian ,mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan dan rekomendasi kebijakan .

Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yg dirumuskan dalam penelitian ini ,terdapat tiga variabel utama yang akan dianalisis yaitu:Pengaruh pendampingan dan pengaruh akses modal.

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tapian Nauli III Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dengan waktu penelitian 4 bulan

3.4 Jenis Data

Berdasarkan prosedur atau cara menghimpunnya Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Nalom Siagian (2021:19), ada dua jenis data yaitu:

1. Data Primer (*Primary Data*)

Yaitu data yang dihimpun dan diolah serta dianalisis sendiri oleh peneliti/observer secara langsung dari objeknya. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, dan menghimpun data melalui kuisioner dengan perangkat dan juga masyarakat desa Tapian Nauli III.

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Yaitu data penelitian yang dhimpun dari bentuk data orang lain yang sudah jadi dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh orang lain. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari Publikasi Ilmiah, buku – buku dan jurnal yang telah diterbitkan.

3.5 Populasi dan Sampel

Menurut Nalom Siagian (2021:53), populasi dapat dikatakan “kumpulan” banyak sampel penelitian, sehingga didalam penelitian sangat diperlukan penentuan sampel tersebut sebagai cara untuk “memudahkan” dalam membaca fenomena atau realitas yang ada. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Tapian Nauli III yang bergabung dalam kelompok tani yaitu sebanyak 331 anggota kelompok tani yang tersebar di 5 kelompok tani di desa Tapian nauli III. Anggota kelompok tani sebagai objek penelitian ini karena pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa adalah melalui kelompok tani. Sedangkan sampel adalah refleksi langsung dari populasi, dimana potret realitas yang akan di data berada sepenuhnya dalam sampel tersebut. (Nalom Siagian 2021:54)

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui Teknik non-probability sampling jenis Quota Sampling. Teknik non-probability sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang tidak melibatkan unsur probabilitas, sehingga dapat dilakukan secara acak dan sederhana, Adapun Quota Sampling artinya jenis Teknik pengambilan data Nonprobability Sampling yang dilakukan melalui klasifikasi populasi, menentukan proporsi sampel tiap kelas, menetapkan quota untuk interviewer Teknik sampling ini termasuk non random sampling, karena tidak memperhitungkan variasi antara setiap unit sampling dan kemungkinan kekeliruan sampel. jenis convenience sampling atau sampel yang dipilih secara kebetulan. Adapun jenis Sampling pada Nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Snowball Sampling. Snowball Sampling yaitu memilih responden via probabilitas, responden berikutnya atas rekomendasi responden sebelumnya tersebut. (Nalom Siagian 2021:57)

Pengambilan sampel dihitung dengan rumus Slovin yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan yang tidak bisa ditolerir (10%)

$$n = \frac{331}{1+331 (10\%)^2}$$

$$n = 76,798114385150$$

Maka dengan demikian untuk mempermudah penelitian, peneliti membultakan banyaknya sampel dari 76,79 menjadi 77 sampel.

3.6 Teknik dan Skala pengumpulan data

Dalam suatu penelitian Teknik dan alat pengumpulan data yang tepat akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel, yang pada gilirannya memungkinkan dirumuskannya generalisasi yang objektif. Karena peneliti menggunakan data primer dan Sekunder maka peneliti mealukan pengumpulan data melalui teknik :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang akan diberikan kepada sampel. Kuesioner ataupun angket dari penelitian dapat dibagikan secara langsung ataupun melalui perantaraan media yang dapat mempermudah pengumpulan data dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan secara langsung dan juga melalui elektromik kepada masyarakat Desa Tapiann Nauli III yang dijadikan sebagai sampel.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Metode pengambilan data dengan cara dokumentasi akan menghasilkan bukti-bukti tertulis dan tidak tertulis yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil Dokumentasi yang dilakukan pada

objek penelitian yaitu Desa Tapian Nauli III akan dilampirkan dalam penelitian sehingga Hasil penelitian akan menguatkan hasil penelitian.

Dalam Menyusun instrument penelitian, seorang peneliti harus memahami mengenai jenis-jenis skala pengukuran yang akan digunakan. Tujuannya adalah agar data yang akan diukur sesuai dengan instrument pengukurnya, sehingga hasil pengukuran bisa dipercaya secara reliable terhadap permasalahan. Ada beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memberikan alat/instrumen yang tepat dalam pengukuran data di lapangan. (Riduawan dalam Nalom 2021:44)

Bentuk skala yang digunakan peneliti yaitu bentuk skala Likert. Skala Likert adalah penskalaan yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang/kelompok orang yang didudukan sebagai responden penelitian, mengenai kejadian atau gejala sosial yang akan diteliti. Skala Likert di desain untuk memberikan derajat penelitian subjek penelitian setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yg dituangkan dalam pertanyaan penelitian.

3.7 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas oleh peneliti sebelum memulai pengumpulan data.

Berdasarkan objek penelitian dan metode penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independent adalah variabel yang menjadi sebab terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independent merupakan variabel yang menjadi penyebab terjadinya sebuah fenomena. Variasi perubahan variabel independent akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel Dependen. Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka yang menjadi variabel independent dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

X1 = Pendampingan

X2 = Akses Modal

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Besarnya perubahan yang terjadi pada variabel independent akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka berdasarkan Latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Minat Berwirausaha masyarakat Desa Tapian Nauli III.

Berikut Operasional Variabel dan skala pengukuran yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala	Sumber Data
Pendampingan (X1)	Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan	1. Pemungkinan (Enabling) atau fasilitasi 2. Penguatan 3. Perlindungan 4. Pendukungan	Skala Likert	Kuesioner

	menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan Dinamisator			
Akses Modal (X2)	<p>Modal adalah dana yang dimanfaatkan sebagai suatu pokok atau induk untuk melakukan perdagangan. Harta atau benda tersebut juga bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu yang mampu meningkatkan kekayaan, dll. Jumlah kekayaan yang diperoleh dari suatu modal sangat dipengaruhi oleh bagaimana si pemilik modal mempergunakan modal yang ada untuk memperoleh laba.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modal sebagai syarat untuk usaha 2. Pemamfaatan modal tambahan 3. Besar modal 	Skala Likert	Kuesioner
Minat (Y)	<p>Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Minat memiliki pengaruh yang besar bagi setiap orang yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perasaan Senang 2. Ketertarikan Masyarakat 3. Perharian Masyarakat 4. Keterlibatan Masyarakat 	Skala Likert	Kuesioner

	menjalankan suatu kegiatan. Dengan adanya minat maka individu akan termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan.			
--	--	--	--	--

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Statistik Inferensial, yang terdiri dari beberapa Teknik.

3.8 Analisis Uji Instrumen

Analisis kuantitatif yang digunakan penelitian ini adalah dengan melakukan uji Instrumen yaitu:

3.8.1 Uji Validitas

Untuk mengumpulkan data kuantitatif dengan mempergunakan test sebagai alat pengukur, validitasnya dapat diukur dengan perhitungan statistic berupa Teknik korelasi. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan :

1. Melakukan korelasi antar skor variabel. Dalam hal ini melakukan korelasi masing-masing variabel dan hipotesis yang diajukan:
 Ho : Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor variabel
 Ha : Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi dengan total skor variabel

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dengan n sebagai jumlah sampel. Selain membandingkan r hitung dengan r tabel, uji signifikansi dapat dilakukan melalui uji t dengan rumus :

$$t = \frac{r}{\frac{1-r^2}{N-2}}$$

Uji validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan kolerasi antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk

2. Uji dengan Confirmatory Factor (CFA)

Analisis faktor konfirmasi akan mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika memiliki muatan faktor lebih besar dari 0,32 (muatan factor > 0,32) dan memiliki person correlation kurang dari 0,05 (pearson correlation <0,05).

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi Pearson Product Moment yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2 - N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}$$

Dimana :

r = Koefisien korelasi

X = Skor butir

Y = Skor total butir

n = Jumlah sampel (Responden)

Selanjutnya, jika nilai r dibandingkan dengan nilai r tabel dengan derajat bebas $(n-2)$. Jika nilai r hasil perhitungan lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel pada alfa tertentu maka berarti signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pernyataan itu valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa reliabilitas alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketetapan alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda.

Untuk mencari reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha :

$$r_{11} = \frac{(k)}{(k-1)} \frac{(1-\sum ab^2)}{at^2}$$

Dimana :

r_{11} = Reliabilitas Instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

ab^2 = Jumlah varians butir

at^2 = Varian total

3.8.3 Analisis regresi linier berganda

Menurut Nalom Siagian (2021:96) secara teoritis, analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi linear sederhana. Dalam

konteks analisis regresi linear sederhana dibuat analisis hubungan satu variabel independent dengan satu variabel dependen. Hubungan ini dinyatakan dalam persamaan linear yang dimaksudkan untuk meramalkan besarnya nilai Y berdasarkan nilai X tertentu.

Regresi linier berganda dapat dihitung dengan persamaan matematika berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Perkembangan usaha

X₁ = Pendampingan

X₂ = Akses modal

a = Konstanta

b₁, b₂, = Koefisien regresi

e = Variabel pengganggu

3.9 Uji Asumsi klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengujian-pengujian terhadap gejala penyimpangan asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat pengujian yang harus dilakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Cara yang digunakan untuk menguji gejala penyimpangan asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.9.1 Uji normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kita dapat melihatnya dari normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sebenarnya akan mengikuti garis normalnya.

3.9.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama diantara grup tersebut yang disebut heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya.

3.9.3 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance inflation factor

(VIF), nilai tolerance yang besarnya di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multi-kolinearitas diantara variabel bebasnya.

3.10 Uji Hipotesis Penelitian

3.10.1 Uji Parsial (t tset/ Uji t)

dengan menggunakan Uji statistik maka peneliti dapat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_1) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = 0$$

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), parameter suatu variabel hasilnya tidak sama dengan nol atau:

$$H_a : b_1 \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen

Cara melakukan Uji t yaitu :

1. Bila jumlah df (degree of freedom) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_1 = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis Alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independent secara individual mempengaruhi variabel Dependen.
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis Alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independent secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3.10.2 Uji Simultan (F test/Uji F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = \dots = b_k = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independent secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Cara melakukan Uji F adalah sebagai berikut:

1. Bila F lebih besar dari 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independent secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan peneliti untuk mengetahui kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 jumlahnya kecil itu berarti variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai $R^2 = 1$ maka hal ini menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi, atau variabel bebas baik X1 maupun X2 mampu menerangkan variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa tidak ada total variasi yang diterangkan oleh variasi bebas yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi baik X1 maupun X2.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arif Yusuf Hamali, 2016 *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Badan Pusat Statistik, 2022. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021*, Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2021. *Direktorat jenderal perimbangan keuangan*

Kasmir, 2006. *KEWIRAUSAHAAN*. Jakarta: Rajawali Pers

_____, 2016. *Manajemen Sumber Daya (Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Siagian, Nalom 2021. *Statistika Dasar (Konseptualisasi dan Aplikasi)*, CV. Kultura Digital Media.

_____, Nalom. 2022, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV. Literasi Nusantara Abadi.

Wahyuningsih, Tri. 2020, *Ekonomi Publik*, PT. Rajagrafindo Persada.

Widiasworo, Erwin. 2019, *Menyusun Penelitian Kuantitatif Untuk Skripsi dan Tesis*, Araska.

Siagian, Nalom (2021) *Statistika Dasar Dan Konseptualiasasi Aplikasi* , CV.Kultura Digital Media, Surakarta

Jurnal :

Agustini, Ferina (Juni, 2017), *Pengaruh Kewirausahaan, Motivasi Belajar, Sosial Ekonomi Orang Tua dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha Siswa*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 6 No. 1

Aprilianty, Eka (November, 2012), *Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Muhammadiyah*, Jurnal Pendidikan Vokasi Volume 2 No. 3

Purwanti, Endang. 2012, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayan dan Kalilondo Salatiga*. Jurnal Among Makarti, Vol 5 No. 9, Juli 2012.

Rauf A. Hatu. 2010, *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat*. Jurnal INOVASI, Vol 7, No. 4, Desember 2010

Lidia Nugrahaningsih Ayal, 2015, Peran Pendamping Sosial Dalam Pembedayaan Fakir Miskin: Studi Pada Pendamping Kube FM di Kota Banjarmasin. Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015.

Siagian, Nalom (2018) "Pengaruh kualitas produk ,promosi dan keunikan produk terhadap keputusan Pembelian berulang minyak kutua- kutus dikota pekanbaru.volume IV, nomor 5.

Skripsi

https://www.Bing.Com/Ck/A?!&&P=29d9cad4883acc39jmltdhm9mty1otq5nze_wmczpz3vpzd02ywu1zmyxzs0xnjmyltrknjutyti2zi05mdkxzd4mzjlm_jemaw5zawq9nte0ma&Ptn=3&Hsh=3&Fclid=Db3cecd8-12db-11ed-A6ac-870433e7b6be&U=A1ahr0chm6ly9lchjpbnrzlnhdhbgzb25nby5hyy5pzc9pzc9lchjpbnvoty2ni8&Ntb=1

https://www.Bing.Com/Ck/A?!&&P=A16e4c5a45d50c70jmltdhm9mty1otq5nze1myzpz3vpzd0xyzg0odu0ys00ytm3ltrmzgutytyxmc02yjliodbkodlkmz_amaaw5zawq9nteyoa&Ptn=3&Hsh=3&Fclid=Fab5bceb-12db-11ed-9009-02840f5c0ad3&U=A1ahr0chm6ly9lchjpbnrzlnhdhbgzb25nby5hyy5pzc9pzc9lchjpbnvqmja1mi8&Ntb=1

https://www.Bing.Com/Ck/A?!&&P=A6373b3da3e9f07ejmltdhm9mty1otq5nze5nszpz3vpzd02njyzmdewny02ntdiltq1nmetywuwms01nja3othlzc4zdc_maw5zawq9nteymw&Ptn=3&Hsh=3&Fclid=13e7f525-12dc-11ed-8a0f-Ed601cae3755&U=A1ahr0chm6ly9vbmvmvzzwfyy2guawqvumvjb3jkl0l_puzi3njeunda2l0rlc2nyaxb0aw9u&Ntb=1

Undang – Undang :

Permendesa PDTT 18 Tahun 2019

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 ayat 1 dan 2

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa